

STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN MODAL SOSIAL LOKAL (Studi pada Masyarakat Miskin Pedesaan di Wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang)

Drs. Oman Sukmana, M.Si.¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model strategi pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan melalui pemanfaatan dan pengembangan institusi sosial lokal dan modal sosial lokal. Oleh karena itu fokus masalah penelitian dirinci ke dalam dua aspek, yaitu : (1) Bagaimanakah gambaran, identifikasi dan pengembangan institusi sosial lokal dan modal sosial lokal pada masyarakat miskin pedesaan?, dan (2) Bagaimanakah pemanfaatan institusi sosial lokal dan modal sosial lokal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan?

Lokasi penelitian dipilih di desa Sukomulyo wilayah Kecamatan Pujon, dengan alasan karena desa ini merupakan kantong kemiskinan. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* yaitu: (1) pemerintah desa dan kecamatan, (2) tokoh masyarakat, dan (3) Ketua institusi sosial lokal. Sedangkan teknik penentuan informan berdasarkan teknik *snowball*, yaitu mereka yang terlibat dan memahami tentang kehidupan sosial masyarakat pedesaan di wilayah kecamatan. Teknik pengumpulan data utama: (1) *indepth interview*, dan (2) FGD. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, di desa Sukomulyo terdapat berbagai jenis institusi sosial dan modal sosial, yaitu meliputi: (1) Karang Taruna, (2) IPNU dan IPPNU, (3) Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH), (4) Kelompok Tani Hutan (KTH) Perhutani, (5) Himpunan Pengelolaan Pembagian Air (HIPPA), (6) Himpunan Pengelolaan Pembagian Air Minum (HIPAM), (7) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), (8) Fatayat NU, (9) Muslimat NU, dan (10) Pemuda Anshor. Modal sosial meliputi: (1) Kegiatan Rutin Acara Selamatan Desa, (2) Kegiatan Gotong Royong, dan (3) Kegiatan Rutin Acara *Tahlilan*, *Yasinan* dan *Sholawatan*. Sedangkan arah pemanfaatan institusi sosial dan modal sosial lokal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan di desa Sukomulyo kecamatan Pujon, adalah meliputi: (1) sebagai sarana bermusyawarah dan bermufakat, (2) sebagai sarana untuk berdemokrasi, (3) meningkatkan peran serta (partisipasi aktif), (4) melatih tenggang rasa (solidaritas sosial), (5) melatih tanggungjawab sosial (kebersamaan), (6) perwujudan perolehan keadilan sosial, (7) pengaturan keteraturan sosial (tertib sosial), (8) media untuk menambah pengetahuan (keterampilan), (9) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, dan (10) meningkatkan kesejahteraan (pendapatan) keluarga. Keberadaan institusi sosial dan modal sosial di desa Sukomulyo, kecamatan Pujon, telah berdampak positif pada upaya peningkatan dan pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan. Dampak positif tersebut dirasakan oleh masyarakat pada semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun aspek agama.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk miskin di Indonesia menurut data Biro Pusat Statistik tahun 1996 berjumlah 22,5 juta jiwa atau 11,8% dari jumlah penduduk Indonesia (Dadang Nurmada, 1997), sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi sekitar 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2% dari jumlah penduduk Indonesia (Epi Supiadi, 2002). Jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa dan sekitar 15,6 juta jiwa (43%) di antaranya masuk dalam kategori fakir miskin. Secara

keseluruhan, pada tahun 2002 presentase penduduk miskin terhadap total penduduk Indonesia adalah 17,6% (Edi Suharso, 2004). Sementara pada tahun 2005 pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), jumlah penduduk miskin Indonesia diperkirakan mencapai 40 juta orang (Jawa Pos, 14 Maret 2005).

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah. Namun upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan hingga kini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa

¹ Drs. Oman Sukmana, MSi, Staff Pengajar Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

maupun kota yang menderita kemiskinan. Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya merupakan upaya pemberdayaan upaya pemberdayaan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik. Kemiskinan merupakan problem multi-dimensional yang penggulungannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi semata (Nugroho, dalam Dewata, 1999).

Program pengentasan kemiskinan akan sangat berhasil apabila masyarakat miskin diberi peluang yang lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri, mempengaruhi kemampuan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempengaruhi kemampuan ekonomi dan kesejahteraan hidup mereka. Keterlibatan masyarakat dalam mengurus diri sendiri akan menjadi penopang keberhasilan pengentasan kemiskinan karena akan menumbuhkan perasaan bangga atas kemampuan diri sendiri (Ancok, dalam Dewanta, 1999).

Pemanfaatan institusi tradisi yang berfokus pada mekanisme sosial budaya lokal dalam gerakan pemberdayaan masyarakat pembangunan (pemberdayaan) harus dipertimbangkan aspek sosial budaya, agama dan etika yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.

Oleh karena itu strategi pemberdayaan masyarakat miskin khususnya di pedesaan dengan memanfaatkan dan mengembangkan institusi lokal dan modal sosial lokal yang berlandaskan pada aspek karakteristik sosial, budaya, agama, nilai dan etika masyarakat lingkungan sosial lokal adalah merupakan strategi yang tepat.

Institusi sosial (lembaga sosial) pada tingkat lokal telah diakui memainkan peran penting dalam proses pembangunan di masyarakat. Lembaga pada hakikatnya menunjukkan pada organisasi informal yang tumbuh di lingkungan yang secara geografis dan kultural merepresentasikan komunitas setempat yang kecil dan terbatas. Organisasi biasanya dibentuk secara swadaya untuk menyelenggarakan pelayanan. Kepengurusan dan fungsi dari Lembaga Sosial Lokal dapat berupa organisasi semi pemerintah, seperti Karang Taruna, Pendidikan Dan Kesejahteraan Keluarga, Posyandu, atau murni mewakili kepentingan masyarakat madani, misalnya: Mitra Cai (Jawa Barat), kelompok Arisan, Kelompok Kematian, dsb. (EdiSuhartono; www.policy.hu/Suharto).

Ada beberapa jenis organisasi (lembaga) sosial yang hingga kini eksis di desa, antara lain organisasi sosial yang berbasis: Keagamaan, Okupasi (mata pencaharian), Jender, Usia, Kebudayaan atau Kesenian, dan Komunitas atau Forum tertentu (Roucek dan Warren; IRE: ireyogya@indosat.net.id)

Modal sosial merupakan serangkaian norma, jaringan dan organisasi di mana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya. Modal sosial yang berkembang di desa lebih banyak berkaitan dengan karakteristik masyarakatnya yang masih memegang teguh nilai atau norma yang sangat diyakini kebenarannya. Modal sosial ini antara lain meliputi: norma, tradisi atau adat istiadat, solidaritas dan keswadayaan.

Hampir di setiap desa masih banyak berkembang norma-norma yang termanifestasi dalam ungkapan lokal: misalnya, *sapa sing ora ngajeni, mengko slirane ora diajani* (Jawa: Siapa yang tidak menghormati orang lain, maka diapun tidak dihormati orang); *mban cindhe mban siladan* (Tidak membedakan-bedakan orang dalam pergaulan di masyarakat); dsb. Pada derajat tertentu kuatnya pandangan terhadap norma ini merupakan upaya penting dalam rangka menjaga dan menjamin ketentraman di masyarakat (IRE: ireyogya@indosat.net.id).

1.2. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang di atas, maka fokus masalah penelitian dirinci ke dalam dua aspek, yaitu:

- 1) Bagaimanakah gambaran, identifikasi dan pengembangan institusi sosial lokal dan modal sosial lokal pada masyarakat miskin pedesaan?
- 2) Bagaimanakah pemanfaatan institusi sosial lokal dan modal sosial lokal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara rinci tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan gambaran, identifikasi dan pengembangan institusi sosial lokal dan modal sosial lokal pada masyarakat miskin pedesaan?
2. Mendeskripsikan pemanfaatan institusi sosial lokal dan modal sosial lokal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Institusi Lokal dan Modal Sosial (*Social Capital*)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, berdampak pada munculnya istilah lokal. Pada tataran makro, istilah lokal adalah lawannya dari istilah global. Sehingga istilah lokal dapat digunakan untuk menyebut peradaban suatu negara, sedang global untuk menyebut peradaban pada tataran antar-negara, baik regional maupun internasional. Lokal menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah pada tataran mikro, artinya istilah lokal untuk menyebut kawasan daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota, dan dimungkinkan lokal untuk menyebut yang lebih spesifik lagi yaitu kecamatan dan desa (Sugiyanto, 2002:58).

Sedangkan institusi (sosial) lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggungjawab atas proses kegiatan pembangunan setempat (Esman dan Uphoff, 1982, dalam Sugiyanto, 2002). Contoh dari institusi sosial lokal adalah Rukun Tetangga (RT), arisan trah, kelompok pengajian, kelompok ronda, dan sejenisnya. Institusi sosial lokal, adalah institusi yang memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Institusi sosial lokal dalam suatu komunitas harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling silang menyilang (*cross-cutting affiliation*) dan institusi sosial lokal telah menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) ketika komunitas lokal berada dalam suatu situasi krisis. Kehadiran institusi sosial lokal bukan atas kepentingan pribadi atau individu tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi sosial lokal lama-kelamaan menduduki pada posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Rasa saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui institusi ini semakin hari semakin didambakan sebagai modal sosial (*social capital*).

Institusi sosial lokal ternyata mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal (Santoso, 2002; dalam Sugiyanto, 2002). Institusi sosial lokal pada dasarnya adalah regulasi perilaku kolektif, di mana sandarannya adalah etika sosial, sehingga institusi sosial lokal mampu menghasilkan kemampuan mengatur diri sendiri dari kecamatan normatif.

Modal sosial merupakan kekuatan yang mampu membangun *civil community* yang dapat meningkatkan

pembangunan partisipatif, dengan demikian basis modal sosial adalah kepercayaan (*trust*), ideologi dan religi. Modal sosial dapat dicirikan dalam bentuk kerelaan individu untuk mengutamakan keputusan komunitas. Dampak dari kerelaan ini akan menumbuhkan interaksi kumulatif yang menghasilkan kinerja, yang mengandung nilai sosial. Francis Fukuyama (1995) mengilustrasikan modal sosial dalam *trust*, *believe* and *vertrauen*, artinya bahwa pentingnya kepercayaan yang mengakar dalam faktor kultural seperti etika dan moral. *Trust* muncul maka komunitas membagikan sekumpulan nilai-nilai moral, sebagai jalan untuk menciptakan pengharapan umum dan kejujuran, ia juga menyatakan bahwa asosiasi dan jaringan lokal sungguh mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan lokal serta memainkan peran penting dalam manajemen lingkungan. Nilai ekonomi, James S. Coleman (1998) menegaskan modal sosial sebagai alat untuk memahami aksi sosial secara teoritis yang mengkombinasikan perspektif sosiologi dan ekonomi. Pengertian ini dipertegas oleh Ismail Serageldin (1998) bahwa modal sosial selalu melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat, dan muncul bukan semata dari interaksi pasar dan memiliki nilai ekonomis.

Ismail Serageldin, memberikan klasifikasi modal sosial antara lain:

1. Modal sosial dalam bentuk interaksi sosial yang tahan lama tetapi hubungan searah, seperti pengajaran dan perdagangan, sedang interaksi sosial yang hubungannya resiprokal (timbal balik) seperti jaringan sosial dan asosiasi.
2. Modal sosial dalam bentuk efek interaksi sosial lebih tahan lama dalam hubungan searah, seperti kepercayaan, rasa hormat dan imitasi, sedang dalam bentuk hubungan timbal balik seperti *gossip*, reputasi, *pooling*, peranan sosial dan koordinasi, semua ini mengandung nilai ekonomi yang tinggi.

Menumbuhkan sikap demokratis, Douglass North (1990), menyebutkan relasi modal sosial diformulasikan dalam berbagai struktur, misalnya pemerintah, rezim politik, aturan hukum dan sistem peradilan. Berangkat dari jalannya pemerintahan, rezim politik, aturan hukum dan sistem peradilan, akan berdampak munculnya sikap-sikap demokratis dari bawah/masyarakat lokal.

2.2. Dimensi-Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial (*social well-being*). Untuk mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah. Namun untuk memahami berapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi oleh seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kuantitatif. Dalam butir ini yang dipersoalkan bukan berapa besar ukuran kemiskinan tetapi dimensi-dimensi apa saja yang terkait dalam gejala kemiskinan tersebut (Ellis, G.P.R, 1984).

Pertama, yang paling jelas bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.

Kedua, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dll. Untuk itu serangan terhadap kemiskinan sama artinya pula dengan pengikisan budaya ini. Apabila budaya ini tidak dihilangkan maka kemiskinan ekonomi juga sulit ditanggulangi.

Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktur sosial paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan bahwa orang yang miskin secara struktural

atau politis akan berakibat pula miskin alam material (ekonomi). Untuk itu langkah pengentasan kemiskinan apabila ingin efektif juga harus mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

Dimensi-dimensi kemiskinan ini pada hakikatnya merupakan gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya dalam artian ekonomi, tetapi memperhatikan prioritas, namun bersamaan dengan itu seyogyanya juga mengejar terget membatasi kemiskinan non-ekonomi. Ini sejalan dengan pergeseran strategi pembangunan nasional, bahwa yang dikejar bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan kualitas manusia seutuhnya (sosial, budaya, dan politik).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu model penelitian yang berusaha untuk membuat gambaran/paparan dan menggali secara cermat serta mendalam tentang fenomena sosial tertentu tanpa melakukan intervensi dan hipotesis. Metode penelitian utama yang digunakan adalah kualitatif, akan tetapi untuk melengkapi analisis akan ditampilkan dan diperkuat pula dengan data-data yang bersifat kuantitatif, dengan pemahaman bahwa penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif yang dilengkapi dan diperkuat dengan data kuantitatif. Analisa kualitatif yang digunakan adalah deskriptif-induktif, sedangkan data kuantitatif yang digunakan adalah prosentase dalam bentuk tabulasi.

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* atau dipilih secara sengaja. Karakteristik wilayah penelitian yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu suatu wilayah lingkungan pedesaan. Lokasi penelitian adalah masyarakat miskin pedesaan di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, khususnya di desa Sukomulyo yang termasuk daerah kantong kemiskinan.

Populasi penelitian adalah masyarakat pedesaan di wilayah kecamatan Pujon, kabupaten Malang. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu: (1) pemerintah desa dan kecamatan, (2) tokoh masyarakat, (3) ketua institusi sosial lokal. Sedangkan teknik penentuan *informan* berdasarkan teknik *snow-ball*, yaitu mereka yang terlibat dan memahami tentang kehidupan sosial masyarakat pedesaan di wilayah kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Dalam penelitian ini, secara garis besar proses pengumpulan data menggunakan 6 (enam) metode pokok yang saling berkaitan dan melengkapi, yaitu:

1. *Rural Community Appraisal (RCA)*

Suatu metode yang digunakan pada saat studi pendahuluan terhadap komunitas masyarakat pedesaan, yaitu masyarakat pedesaan yang tergolong desa miskin.

2. *Focus Group Discussion Technique (FGDT)*

Penggunaan berbagai forum kelompok primer dalam masyarakat sebagai media diskusi terfokus mengenai realitas sosial dalam hal ini adalah tentang berbagai fungsi institusi lokal dan modal sosial lokal. FGD melibatkan para tokoh masyarakat dan pengurus institusi sosial lokal.

3. *Indept Interview*

Teknik wawancara mendalam akan dilakukan baik terhadap subjek maupun responden kunci.

4. *Survey*

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan.

Teknik Pengumpulan Data

1) Karakteristik Masyarakat

1. Observasi Langsung Pedesaan
2. RCA

2) Gambaran Institusi Sosial Survey & modal sosial lokal

1. FGDT
2. *Information Controll*
3. *Indept Interview*

Secara umum penelitian ini menggambarkan/mendeskripsikan fenomena yang muncul secara objektif tanpa melakukan intervensi terhadap objek. Karena data berupa deskripsi, maka data yang dianalisis adalah data kualitatif dan data-data yang merupakan data kuantitatif berfungsi sebagai pelengkap analisis untuk membantu memperjelas pendeskripsian data kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu mulai bulan Pebruari sampai dengan bulan Juli 2005, dengan alokasi penggunaan waktu meliputi: bulan ke-1 dan ke-2 digunakan untuk persiapan, bulan ke-3 dan ke-4 digunakan untuk penelitian, dan bulan ke-5 dan ke-6 digunakan untuk proses penyelesaian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, di desa Sukomulyo terdapat berbagai jenis institusi sosial dan modal sosial, antara lain sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Pengembangan Insititusi Sosial, meliputi:

1. Karang Taruna
2. IPNU dan IPPNU
3. Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH)
4. Kelompok Tani Hutan (KTH) Perhutani
5. Himpunan Pengelolaan Pembagian Air (HIPPA)
6. Himpunan Pengelolaan Pembagian Air Minum (HIPPAM)
7. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
8. Fatayat NU
9. Muslimat NU
10. Pemuda Anshor

2. Identifikasi dan Pengembangan Modal Sosial
Sedangkan identifikasi dan pengembangan berbagai modal sosial yang ada di lingkungan pergaulan masyarakat desa Sukolmulyo yang hidup dan berkembang atas dasar nilai-nilai, kebiasaan dan tradisi masyarakat, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kegiatan rutin acara selamatan desa
2. Kegiatan gotong royong
3. Kegiatan rutin acara *tahlilan*, *yasinan* dan *sholawatan*

Sementara itu untuk arah pemanfaatan institusi sosial dan modal sosial lokal sebagai strategi pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan di desa Sukomulyo kecamatan Pujon, adalah meliputi:

1. Sebagai sarana bermusyawarah dan bermufakat
2. Sebagai sarana untuk berdemokrasi
3. Meningkatkan peran serta (partisipasi aktif)
4. Melatih tenggang rasa (solidaritas sosial)
5. Melatih tanggung jawab sosial (kebersamaan)
6. Perwujudan perolehan keadilan social
7. Pengaturan keteraturan sosial (tertib sosial)
8. Media untuk menambah pengetahuan (keterampilan)
9. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
10. Meningkatkan kesejahteraan (pendapatan) keluarga

Keberadaan institusi sosial dan modal sosial di desa Sukomulyo, kecamatan Pujon, telah berdampak positif pada upaya meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan. Dampak positif tersebut dirasakan oleh masyarakat pada semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun aspek agama.

5. KESIMPULAN & SARAN

5.1. Kesimpulan

Desa Sukomulyo sebagai kantong kemiskinan di wilayah kecamatan Pujon, Kabupaten Malang telah berkembang berbagai institusi sosial dan terdapat beberapa modal sosial yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat. Berbagai institusi sosial tersebut telah memberikan manfaat dan telah dikembangkan oleh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin, baik dalam ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, dan sebagainya.

5.2. Saran

1. Berbagai institusi sosial dan modal sosial yang ada dan hidup di masyarakat desa Sukomulyo perlu terus dipertahankan, dibina dan bahkan dikembangkan. Peran serta pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pengembangan sangat penting.
2. Perlu optimalisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi kegiatan berbagai institusi sosial, sehingga dampak pemanfaatannya bagi proses pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewanta, A.S., (ed.). 1999. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Aditya Media. Yogyakarta.
- Bakht, I., (et.al). 2001. Menggempur Akar-Akar Kemiskinan. YAKOMA-PGI. Jakarta.
- Nurmada, D., 1997. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Kesejahteraan Sosial. Jurnal Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Nomor : 06 Tahun 1997.
- Supiadi, E., 2002. Pergeseran Paradigma dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol 1 Nomor 1, Mei 2002: STKS Bandung.
- Irwanto., 1998. Focus Group Discussion : Suatu Pengantar Praktis. Pusat kajian pembangunan masyarakat - Unika Atmajaya. Jakarta.
- Adi, I.R., 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Lembaga Penerbit FEUI. Jakarta.
- Kusnadi., 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. LkiS. Yogyakarta.
- Krustanto., 2003. Hutan Berbasis Kemasyarakatan : Solusi Alternatif dalam Otonomi Daerah. <http://www.arupa.or.id>.
- Sunarto, K., 1993. Pengantar Sosiologi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soetrisno, L., 1999. Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan; dalam Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Editor: Awan Setya Dewanta. Aditya Media. Yogyakarta.
- Soetrisno, L., 2003. Pembangunan Nasional dan Budaya Lokal : Industrialisasi Kehutanan dan Sistem Pertanian Berladang di Indonesia. <http://202.159.18.43/jsi/lloekman.htm>.
- Mubyarto. 1995. Profil Desa Tertinggal Indonesia. Aditya Media. Yogyakarta.
- Tjokrowinoto, M., 2001. Pembangunan, Dilema dan Tantangannya. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Singarimbun, M., dkk. (ed.). 1995. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta.
- Mardalis., 1998. Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soelaiman, M., 1998. Dinamika Masyarakat Transisi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Maskun, S., 1995. Pembangunan Masyarakat Desa: Asasa, Kebijakan dan Manajemen. Media Widya Mandala. Yogyakarta.
- Faisal, S., 2001. Format-Format Penelitian Sosial. Manajemen. Jakarta.
- Soerjono Soekamto, S., 1986. Sosiologi : Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta.
- Aminah, S., 1997. Kemiskinan Petani dan Upaya Penanganannya. Jurnal Informasi Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Nomor 4 tahun 1997.
- Suradi., 2000. Strategi Pembangunan Masyarakat: Tinjauan ke arah Program Sosial Partisipatif. Jurnal Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan

